

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam komunikasi politik, penguasa atau kaum elit politik terkadang mereka menghindari suatu peristiwa yang kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. Untuk mengurangi terjadinya hal demikian, para elit mengemas informasi dan pesan yang disampaikannya dengan bentuk ujaran yang telah dipertimbangkan. Ujaran-ujaran demikian tak ubahnya untuk mempermudah proses penyampaian pesan komunikasi politik antara elit politik dan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan konflik eksternal yang tidak diinginkan. Hal ini sejalan dengan misi komunikasi, yaitu terbentuknya masyarakat yang mampu memahami respon komunikasi politik dengan baik (Ismail, 2007: 77).

Realitas ini dapat dicontohkan dengan adanya acara Debat Cawapres 2019. Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres kini saling menyuarakan aspirasi dan program kerjanya masing-masing di hadapan seluruh warga negara Indonesia melalui kontestasi debat politik. Sebagaimana diliput dalam media CNN Indonesia, bahwa acara kenegaraan tersebut disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi nasional dan pemberitaannya tersebar di berbagai media sosial. Sebagaimana dilansir melalui laman *CNNIndonesia.com* (2019) KPU menyaratkan 18 Stasiun Televisi untuk menayangkan acara ini, diantaranya TVRI, RRI, Kompas TV, Rajawali TV, RCTI, GTV, MNC TV, iNews TV, Trans TV, Trans7, CNNIndonesia, MetroTV, SCTV, Indosiar, TVOne, ANTV, Berita Satu TV, dan Net TV

Selama proses kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, suara masyarakat ialah penentu kemenangan para paslon. Pelaksanaan debat Capres dan Cawapres ini mempunyai makna strategis sebagai bentuk komunikasi persuasif kepada calon pemilih yang akan menentukan pilihan mereka

di TPS. Dalam hal ini, pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu pokok masalah yang diusung oleh moderator menjadi hal utama yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak. Masing-masing peserta debat memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya. Banyak strategi yang direncanakan dan digunakan untuk mencapai kepentingan politik dari setiap ungkapan yang disampaikan (Wahyuningsih, 2020: 66)

Setiap kata yang diucapkan, simbol yang diberikan, dan intonasi pembicaraan tidaklah semata-mata sebagai ekspresi pribadi atau cara berkomunikasi, tetapi merupakan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal yakni memperoleh dukungan pemilih. Berkenaan dengan hal tersebut, ujaran yang digunakan dikemas dalam pilihan kata dan kalimat yang aman, lebih halus, dan sopan untuk diungkapkan dan menggantikan ungkapan lain yang dianggap tidak sopan atau dipercaya dapat mendatangkan bahaya yang dalam ilmu linguistik dikenal dengan eufemisme. Allan (2012) menyebut eufemise dapat digunakan sebagai ekspresi alternatif untuk menghindari realitas konflik yang mungkin terjadi sebab komunikasi yang tidak disukai dan menimbulkan ketersinggungan terhadap mitra tutur.

Dalam kontestasi debat Capres-Cawapres 2019, KH. Ma'ruf Amin dalam argumentasinya sebagaimana dilansir oleh media *kompas.com* (2019) mengatakan bahwa Jokowi dan dirinya akan menginstruksikan pengoperasian tiga kartu sakti untuk masyarakat yakni KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Kartu Sembako dan Kartu Prasejahtera. Lebih lanjut pihak *detik.com* (2019) merilis bahwa ketiga kartu tersebut menjadi media dan pilar utama dari kesekian program-program pemerintah yang menjunjung tinggi nilai kesejahteraan masyarakat. Kemudian liputan dari *kompas.com* (2019) menguatkan ketiga kartu tersebut sebagai agenda politik dan diwujudkan di tahun 2020 jika dia menjadi presiden periode kedua.

Kata “prasejahtera” kini merupakan istilah yang digunakan untuk menghilangkan stigma sosial negatif di masyarakat dan meningkatkan

kepercayaan diri bagi masyarakat miskin. Pelabelan “prasejahtera” juga digunakan karena dianggap agar penyandang status tersebut lebih terhormati harkat dan martabatnya. Namun disisi lain, dampak yang dirasakan melalui penggunaan kata prasejahtera ini adalah negara Indonesia terkesan tidak memiliki rakyat miskin karena dunia telah tersamarkan oleh sebuah bahasa. Sejalan dengan relasi bahasa dan politik yang diungkap di atas, bahwa pernyataan demikian menghadirkan eufemisme sebagai pendekatan bahasa agar mudah diterima oleh masyarakat tanpa mendiskreditkan pihak publik. Demikian adalah salah satu contoh kecil dari penggunaan eufemisme dalam kontes politik di Indonesia (Wahyuningsih, 2020: 71).

Kemudian lebih lanjut, salah satu deskripsi data dalam transkripsi percakapan debat Pilpres-Cawapres 2019 yang diakses pada laman *tirto.id* (2019) menyebut “Indonesia menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan”. Ungkapan demikian diujarkan oleh Capres Prabowo Subianto saat menjelaskan visi-misi pemerintahannya. Kalimat “kondisi yang tidak begitu menguntungkan” merupakan stimulasi komunikator dengan menggunakan diksi yang mengarah pada eufemisme atau kesantunan berbahasa. Kalimat ini memiliki disfemisme makna “rugi”. Penggunaan kata “tidak begitu menguntungkan” dirasa sangat tepat agar direspon baik oleh mitra tutur terlebih dalam nuansa politik agar lebih menarik simpati masyarakat. Ungkapan “prasejahtera” dan “kondisi yang tidak begitu menguntungkan” kini diujarkan sebagai bahasa verbal yang santun agar dapat mempolarisasi masyarakat dan menyandera ideologi mereka sebagai perilaku yang menguntungkan. Ungkapan ini sangat tepat jika diujarkan guna meraih simpati masyarakat karena sifatnya yang memenuhi sikap bahasa dan tidak berseberangan dengan norma sosial. Ungkapan ini juga tengah memenuhi maksim kuantitas dan kualitas secara pragmatik, sehingga dapat mereda tensi masyarakat

dan bersikap bijak kepada Capres dan Cawapres pilihan mereka (Wahyuningsih, 2020: 69).

Menyoal realita demikian, bahasa di bidang politik dan diplomatik kini tengah berkembang menjadi ruang yang paling bebas dan terbuka. Tidak sedikit para politisi yang memanfaatkan bahasa untuk meraih simpati dan popularitas hingga membangun citra di mata masyarakat (Yunus, 2017). Sejalan dengan perkembangan media sosial yang efektif, segala bentuk demokrasi semakin mudah untuk dipublikasikan dan diakses oleh siapa saja. Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi para politisi untuk menjalin interaksi dan meraih atensi dengan mudah.

Pergeseran fungsi bahasa dari normatif menuju kreatif kini terus berkembang seiring kebutuhan bahasa dengan realitas empiris guna menjawab fenomena-fenomena sosial yang kini menjadi keniscayaan. Jakobson (1980) dalam sebuah karyanya yang berjudul *The Framework of Language*, membagi fungsi bahasa atas enam kelompok; emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Keenam fungsi khusus ini sebagai bentuk pembacaan bahasa pada hierarki khusus yang bertumpu pada enam aspek menurut Karl Buhler (1920); penutur (*addresser*), konteks (*context*), amanat (*message*), kontak (*contaxt*), kode (*code*), dan mitra tutur (*addresce*).

Keenam fungsi khusus bahasa demikian terus berkembang sesuai dengan muara yang dituju semisal tumpuan amanat (*message*) dan mitra tutur (*addresce*) menjadi pengembang atas dasar tumbuh kembang *political language* atau politik bahasa yang dikembangkan oleh George Orwell (1950). Politik bahasa sebagai embrio analisis gejala bahasa dan derivasinya terhadap realitas politik kini melaju cepat beralihfungsi bahasa sebagai media negoisasi, pencitraan, dan pembelaan diri atas kuasa bahasa. Diskursus demikian menjalin perilaku komunikasi yang bijak dan menggunakan media bahasa yang lebih santun yang pada tahap ini sejalan dengan fungsi eufemisme Allan (2012) bahwa eufemisme digunakan

sebagai media alternatif atas ekspresi yang kurang bijak dalam tindak tutur komunikasi. Lebih lanjut jika komunikasi eufemisme demikian bersinggungan dengan politik sebagaimana diungkap Fernandez (2014), eufemisme sebagai fungsi menghindari ujaran-ujaran kasar pada tataran norma sosial.

Penelitian yang relevan tentang penggunaan eufemisme dalam debat pernah dilakukan oleh Astuti (2016). Amelia, dalam penelitiannya mengenai “Eufemisme Bahasa Pendukung Capres RI Tahun 2014 dalam akun *Facebook*: Kajian Sosiopragmatik”, menemukan pernyataan-pernyataan yang mengandung ungkapan eufemisme dalam penyampaian aspirasi yang di unggah oleh para pendukung calon Presiden RI 2019 di akun *Facebook*. Amelia menganalisis dan mengklasifikasikan data temuannya kedalam bentuk, fungsi dan makna ekspresi eufemisme, serta hubungan antara penggunaan eufemisme dengan aspek sosial penutur. Beberapa teori yang digunakan adalah teori Warren (1992) yang digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk eufemisme, proses pembentukan kata hingga penggolongan kategori eufemisme, teori Palmer (1976) untuk memaparkan makna dan hubungan leksikal semantis, juga teori milik Leech (1981) yang digunakan untuk menganalisis ke tujuh tipe makna eufemisme. Amalia juga menganalisis fungsi eufemisme menggunakan teori Burridge (1991) dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh terhadap penggunaan eufemisme dikaji Amalia menggunakan teori Wijana (2012) mengenai aspek sosial penutur.

Demikian pula Nurasih dan Setiawan (2019:90) dalam penelitiannya mengenai Penggunaan X-Femisme dalam Debat Pilkada DKI 2017 menemukan bahwa dalam debat tersebut terdapat beberapa bentuk, makna dan fungsi gramatikal X-Femisme (Eufemisme, Ortofemisme dan Disfemisme). Dalam simpulan, Nurasih dan Setiawan telah memaparkan empat hal yang menjadi kajian utama penelitiannya, diantaranya mengenai bentuk X-Femisme yang teridentifikasi dalam debat Pilkada DKI 2017 ialah kata, frasa, dan kalimat.

Mereka juga menyampaikan bahwa mereka menemukan pula bentuk disfemisme dengan satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu kalimat.

Lalu selanjutnya ialah makna X-Femisme yaitu makna konotasi, denotasi dan idiomatis. Pada ungkapan ortofemisme hanya mengandung makna denotasi. Hal tersebut dikarenakan, ortofemisme merupakan ungkapan langsung dan netral. Sementara itu, ungkapan disfemisme merupakan ungkapan yang mengandung makna konotasi negatif dan denotasi. Terakhir, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ungkapan eufemisme termasuk ke dalam kategori ungkapan yang halus dan disenangi. Selain eufemisme, ungkapan ortofemisme juga termasuk ke dalam kategori ungkapan yang halus dan disenangi, namun tidak semua ungkapan ortofemisme mengandung kesantunan. Hal itu dikarenakan, sifat dari ungkapan ortofemisme yang langsung, kadang-kadang membuat orang tidak suka ketika mendengarnya. Sementara itu, disfemisme tidak termasuk ke dalam ungkapan yang halus dan disenangi. Disfemisme juga cenderung ke dalam kelompok ungkapan yang kasar dibandingkan eufemisme maupun ortofemisme (Nurasih dan Setiawan, 2019:90)

Perbedaan penelitian Amelia dengan penelitian Nurasih dan Setiawan terletak pada objek penelitiannya. Amalia menentukan Media Sosial berupa *Facebook* sebagai sumber memperoleh data sedangkan Nurasih dan Setiawan menjadikan data transkripsi dialog peserta debat sebagai sumber data penemuan ekspresi eufemisme. Adapun titik relevansi dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa kedua penelitian ini sama-sama mengidentifikasi penggunaan eufemisme dalam debat.

Penelitian seputar efemisme mutakhir yang dapat dijadikan referensi dan pijakan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Wahyuningsih (2020) dengan judul “Eufimisme dalam Debat capres Indonesia”. Wahyuningsih, dalam penellitiannya menulis fokus realisasi penggunaan eufemisme yang dituturkan kandidat presiden dalam debat capres 2019 yang meliputi jenis-jenis dan fungsi

eufemisme, pengaruh aspek sosial budaya terhadap penggunaan eufemisme, dan implikasi dari penggunaan eufemisme. Wahyuningsih menggunakan tiga *grand theory* dalam penelitiannya, teori bahasa dan budaya, teori pragmatik, dan teori eufemisme Allan & Burridge (1991). Dari ketiga teori tersebut, peneliti menggunakan teori eufemisme yang meliputi definisi dan jenis-jenis eufemisme serta fungsinya sebagai dasar analisis data sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh jenis eufemisme yang dituturkan oleh kandidat presiden meliputi: (1) kata serapan dan kata pinjaman, (2) perifrasis, (3) litotes, (4) metafora, (5) hedges, (6) underspecification, (7) understatement, (8) overstatement, (9) downtoner, (10) apologetic expressions. Jenis-jenis eufemisme yang dituturkan kandidat memiliki delapan fungsi, diantaranya (1) fungsi menyamarkan makna tabu, (2) mengganti pernyataan kasar, (3) memitigasi keterancaman muka, (4) mengkritik secara halus, (5) mengungkapkan pernyataan belum pasti, (6) meredakan perseteruan, (7) menunjukkan kesan positif diri, dan (8) fungsi pembelaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu jenis eufemisme berpotensi memiliki lebih dari satu fungsi, sehingga eufemisme memiliki fungsi diskursif dalam komunikasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi penggunaan eufemisme terhadap aspek budaya di Indonesia. Aspek budaya yang mempengaruhi penggunaan eufemisme dalam debat capres meliputi (1) budaya berbicara tidak langsung, (2) budaya menghormati, dan (3) budaya kebersamaan. Penggunaan jenis dan fungsi eufemisme serta relasinya terhadap aspek budaya terdapat implikasi bahwa kandidat menggunakan eufemisme dan fungsinya dengan intensitas yang berbeda karena kandidat memiliki gaya komunikasi, maksud, latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa efek dari penggunaan eufemisme dalam debat, esensi daripada debat itu sendiri tidak tampak pada debat capres 2019.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis ialah bahwa wahyuningsih (2020) menentukan teori jenis eufemisme pada level

kata dan kalimat menurut Allan (1991), Burrridge (2012), dan Fernandez (2014) untuk menganalisis jenis-jenis eufemisme pada debat kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan penelitian ini menggunakan teori eufemisme Warren (1992) terkait proses pembentukan kata pada inovasi semantis dalam debat kandidat calon presiden dan wakil presiden. Wahyuningsih (2020) menentukan dua fungsi eufemisme yang tercatat dalam debat kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Allan & Burrridge (1991). Teori fungsi eufemisme tersebut ditentukan pada dua fungsi yakni fungsi interpersonal dan fungsi ideasional, sedangkan peneliti menganalisis debat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan teori fungsi eufemisme menurut Burrridge (2012). Teori ini terbentuk dalam enam jenis yaitu eufemisme perlindungan (*the protective euphemism*), eufemisme penyemangat (*the uplifting euphemism*), eufemisme kecurangan (*the underhand euphemism*), eufemisme provokasi (*the provocative euphemism*), kepaduan eufemisme (*the cohesive euphemism*), dan eufemisme menggelikan (*the ludic euphemism*). Perbedaan berikutnya adalah Wahyuningsih (2020) memaparkan aspek-aspek budaya yang mempengaruhi penggunaan eufemisme dalam debat capres-cawapres. Sedangkan penelitian ini memaparkan makna kontekstual eufemisme yang diujarkan oleh para kandidat calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam debat menurut teori makna kontekstual Hornby yang menyebut bahwa konteks adalah (1) situasi di mana sesuatu terjadi dan hal itu menolongmu untuk memahaminya. (2) kata-kata yang datang sebelum atau sesudah kata, frase atau pernyataan yang membantumu untuk memahami maknanya (Hornby, 2000)

Dengan demikian, adanya fenomena penggunaan eufemisme yang berpotensi mengandung makna lain dalam peristiwa debat tersebut membuat peneliti akan mengkaji salah satu rangkaian acara debat yang diadakan dalam rangka pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Peneliti memilih debat perdana Pilpres 2019 yang bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang

diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Januari 2019. Acara dibagi menjadi enam segmen dan bertemakan hukum, korupsi, terorisme, dan hak asasi manusia. Debat ini disiarkan secara langsung oleh lembaga televisi nasional, radio, dan aliran langsung di berbagai akun media sosial (Budiman 2019:20) .

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tulis di atas, maka ditemui masalah pokok penelitian, yakni bagaimana penggunaan bahasa politik dalam demokratisasi di Indonesia? Masalah pokok demikianlah yang kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut;

- a. Apa bentuk eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat?
- b. Apa fungsi eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat?
- c. Apa makna kontekstual dari eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berpijak dari masalah pokok dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibagi ke dalam dua tahapan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah mendekripsikan bahasa politik dalam demokratisasi di Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya dibagi dalam tiga hal sebagaimana berikut:

- a. Mengidentifikasi bentuk eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat
- b. Menjelaskan fungsi eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat

- c. Mendeskripsikan makna kontekstual eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat

1.4. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif yang memiliki rasionalitas akademik yang tinggi, maka penelitian ini harus memiliki signifikansi sebagai bentuk kontribusi ilmiah atas perkembangan ilmu pengetahuan ke dalam beberapa aspek. Adanya signifikansi penelitian memberi arti bahwa penelitian ini akan menjadi media pengembangan penelitian berikutnya terutama penelitian-penelitian yang masih berkaitan dengan studi Linguistik.

Penelitian dengan judul Bahasa Politik dalam Demokratisasi di Indonesia ini memiliki empat manfaat pokok, diantaranya adalah manfaat teoritis, manfaat kebijakan, manfaat praktis, dan manfaat isu serta aksi sosial. Penjelasan dari masing-masing signifikansi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis mempunyai signifikansi penelitian ke dalam aspek teoritis, yakni adanya penelitian ini dapat berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, gagasan konsep, dan penelitian teoritis pada tahap lanjut. Pengelompokan manfaat teoritis penelitian dengan judul Bahasa Politik dalam Demokratisasi di Indonesia adalah terbagi dengan bagian-bagian berikut:

- a. Hasil penelitian penggunaan eufemisme ini diharapkan dapat menjadi pengembangan akademik di bidang linguistik terapan sub disiplin pragmatik fungsional, sosiolinguistik, semantik, dan linguistik forensik. Eufemisme sebagai kesantunan berbahasa dapat bersinergi dengan disiplin ilmu politik sebagai pembentukan proses tindak tutur. Perihal ini juga sebagai pengembang etika berpolitik dengan bahasa verbal.

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi yang memberikan pemahaman baik kepada pembaca atau peneliti selanjutnya mengenai penggunaan ungkapan eufemisme dalam ranah politik.
- c. Sebagai sumber referensi tambahan bagi pembaca seputar fenomena ungkapan eufemisme dalam ranah politik dan aplikasinya dalam berbahasa.

2. Manfaat Kebijakan

Pada tahap ini, penelitian dengan judul Bahasa Politik dan Demokratisasi di Indonesia menjadi media penimbang akan perkembangan kebijakan formal dalam bidang linguistik terapan dan ilmu politik. Dalam bidang linguistik, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi atas perkembangan sikap bahasa yang harus digunakan dan diujarkan oleh pengguna bahasa dalam arti masyarakat tutur, agar bahasa memiliki register yang signifikan demi menjaga kemartabatan bahasa. Menyoyal pada tahap ini, penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tutur atas bahasa-bahasa yang dapat digunakan dalam kontes politik.

Manfaat penelitian ini dalam sisi kebijakan ilmu politik adalah, bahwa dengan adanya penelitian yang mempunyai pokok bahasan bahasa dan politik dapat memberi kontribusi bahwa relasi bahasa dan politik demikian sangatlah penting, terutama disaat musim politik. Adanya penelitian ini diharap menjadi penimbang kebijakan pada studi politik pragmatis, bahwasanya penggunaan bahasa-bahasa dalam kontestasi politik harus tetap menjaga normativitas dan register bahasa. Ini sangat ditekankan kepada pelaku politik atau elit politik yang sedang bergelut dengan politik

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis menjadi salah satu signifikansi penelitian yang bersifat pragmatis. Adanya penelitian ini diharapkan berkontribusi pada aspek-aspek

pragmatis yang berkaitan dengan studi Linguistik. Manfaat praktis menjadi signifikansi secara khusus dapat diterima pemerintah, elit politik dan secara umum dapat diterima masyarakat umum. Berikut manfaat-manfaat penelitian ini dalam aspek pragmatis:

- a. Kepada Pemerintah dan pihak yang berwajib, bahwasanya penelitian ini dapat menjadi penimbang kebijakan mereka terhadap isu-isu politik dalam kancah publik terutama yang menggunakan media bahasa sebagai pilar politik.
- b. Kepada Elit politik, bahwasanya bahasa-bahasa yang diujarkan oleh elit politik menjelang pesta demokrasi harus senantiasa dikemas dengan ragam tindak tutur yang baik. Para elit politik harus menyadari bahwasanya bahasa yang diujarkan menjelang pesta demokrasi akan memberi dampak yang signifikan kepada mitra tutur.
- c. Kepada masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi edukasi politik, bahwa ujaran-ujaran verbal yang dilakukan oleh elit politik harus senantiasa disaring dan tidak diterima secara mentah, agar masyarakat tidak mudah terkontaminasi terlebih terprovokasi atas arus politik yang sedang berlabuh

4. Manfaat Aksi Sosial

Manfaat penelitian dalam aksi sosial sebagaimana dijelaskan (Marshall & Rossman, 2006) penelitian mungkin bisa dikatakan sebagai alat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya aksi.

Adanya penelitian Bahasa Politik dalam Demokratisasi di Indonesia ini dapat menjadi media edukasi masyarakat umum sebagai daftar calon pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah. Bahwasanya, sebagai pemilih dan pendukung calon pemimpin pejabat publik, masyarakat harus tetap bersikap arif dan mematuhi norma-norma sosial,

sikap bahasa, dan komunikasi sosial. Masyarakat tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada sikap anarkis, menyuarakan ujaran kebencian, dan nyinyir di saat kampanye menjelang pemilu.

1.5. Sistematika Penulisan

Struktur organisasi tesis atau sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul Bahasa Politik dalam Demokratisasi di Indonesia ini dibagi ke dalam lima bab. Pada masing-masing bab akan dijelaskan sub bab. Untuk lebih jelas, berikut peneliti sajikan sistematika pembahasannya:

BAB I Pendahuluan

1.2.Latar Belakang Masalah

1.3.Rumusan Masalah

1.4.Tujuan Penelitian

1.5. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1.5.2. Manfaat Kebijakan

1.5.3. Manfaat Praktis

1.5.4. Manfaat Aksi Sosial

1.6.Struktur Organisasi Tesis

BAB II Kajian Pustaka

2.5. Teori dan Dialektika Eufemisme

2.6. Bentuk Eufemisme dalam Diskursus Linguistik dan Tindak Tutur

2.7.Fungsi Eufemisme dalam Perspektif Linguis

2.8.Makna Kontekstual

BAB III Metode Penelitian

3.1.Desain dan Pendekatan Penelitian

3.2.Data dan Sumber Data

3.3.Teknik Pengumpulan Data

3.4.Analisis Data

BAB IV Temuan dan Pembahasan

44. Bentuk eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat

45. Fungsi eufemisme yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat

46. Makna kontekstual yang digunakan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

1.1.Simpulan

1.2.Implikasi

1.3.Rekomendasi